

## ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PLTMH DI PANEKI DESA POMBEWE KECAMATAN BIROMARU KABUPATEN SIGI

Agustinus Kali\*

### *Abstract*

*The purpose this research first, to know the level of society participation analysis and local institution towards planning, developing and generator management PLTMH at Paneki of Pombewe Biromaru District Sigi Regency; second, to know the role of local institution in the village in order to support this program. This research is a qualitative descriptive which is supported by quantitative with using of survey method in information and data collecting. Sample taking is conducted with non-probability sampling by using of census or surfeited sampling technique. Hypothesis test is done by using frequency distribution table and cross tabulation.*

*The results of this research indicates that, first, participation of society towards a planning, implementation, and management PLTMH in Paneki with the low percentage because socialization process is not so well, understanding degree of society is low, the society is focus in their activity, economic condition and sense of belonging on existence of PLTMH in Paneki is still less. Second, the role of local institution in this village to support this program is very low, because there is no coordination between village government and local institution as the channel of inspiration of society and also the attention of local institution towards this PLTMH is very low.*

**Keyword:** *Hydro Micro Power Electricity (PLTMH), Community Participation*

### **1. Pendahuluan**

Untuk meningkatkan pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat serta dalam rangka pemerataan hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat maka pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik pada pasal 2A yang berbunyi : Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil, perbatasan antar negara dan pembangunan listrik perdesaan.

Penanganan penyediaan dana pembangunan sarana kelistrikan dimaksudkan untuk meningkatkan elektrifikasi serta dalam rangka misi sosial untuk membantu kelompok

masyarakat tidak mampu agar kelangsungan akses pelayanan kelistrikan dapat terjamin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada tahun 2005 Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah membangun sebuah PLTMH di Paneki Desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi untuk membantu kelompok masyarakat tidak mampu yang ada di sekitar lokasi. Bantuan pemerintah berupa penyediaan dana pembangunan yang di dalamnya masyarakat diberi peluang atau kesempatan untuk ikut berpartisipasi mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan karena ketersediaan biaya pembangunan sangat terbatas. Kebijakan ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki akses untuk ikut terlibat, turut memikirkan, merencanakan, melaksanakan dan mengelolah hasil pembangunan sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan semata tetapi sudah menjadi subjek pembangunan. Seringnya terjadi

---

\* Staf Pengajar Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Palu

kegagalan dalam menempatkan suatu proyek di wilayah perdesaan karena masyarakat tidak dilibatkan sejak awal sehingga masyarakat hanya sebagai penonton pelaksanaan program akibatnya pada diri mereka tidak timbul rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap keberadaan proyek tersebut. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat terkesan lepas tangan terhadap proyek yang dilakukan oleh pemerintah walaupun mereka sendiri yang menikmati hasil pembangunan karena mereka beranggapan bahwa proyek tersebut merupakan milik pemerintah sehingga mereka tidak perlu melakukan pemeliharaan dan perawatan.

Dengan adanya latar belakang tersebut maka masalah yang kami angkat yaitu

bagaimana partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pembangunan PLTMH di Paneki Desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Paneki Desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi.

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan kepada pemerintah sebagai perencanaan pembangunan tentang tingkat partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) serta menambah wawasan dan keilmuan bagi peneliti tentang masalah yang ditemukan di lapangan.

## 2. Tinjauan Pustaka

### Partisipasi

Pengertian sederhana tentang partisipasi dalam hubungannya dengan pembangunan adalah mengambil bagian atau ikut berperan secara aktif dalam semua proses pelaksanaan pembangunan sesuai kemampuan.

Mubyarto (1988:52) mendefinisikan partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi masyarakat secara sukarela dalam proses pembangunan sangat diharapkan untuk membantu terwujudnya program pembangunan yang ada di perdesaan tanpa ada yang dikorbankan. Karena dengan demikian

masyarakat memiliki rasa peduli atas pembangunan yang dilaksanakan.

Soemodiningrat (1996:97) mengemukakan bahwa partisipasi adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program atau proyek pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah.

Dalam proses pembangunan diharapkan adanya kesadaran dari masyarakat dan mempunyai rasa tanggung jawab yang penuh dalam diri sendiri sehingga pembangunan yang telah dilakukan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik.

Menurut Soetrisno (1995:207), mengatakan bahwa partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.

Uphoff dalam Endang (2003:37) mengatakan bahwa partisipasi pembangunan dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya menurut Davis dalam Endang (2003:34) menyatakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berupa : (1). Pikiran (psychological participation); (2) Tenaga (physical participation); (3) Keahlian (participation with skill); (4) Barang (material participation); (5) Uang (money participation).

Menurut Kaho (2002:40), partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat tahap yaitu :

- 1). Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan.
- 2). Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan.
- 3). Partisipasi dalam pemanfaatan hasil.
- 4). Partisipasi dalam mengevaluasi.

Menurut Tjokroamidjojo (1996:207) mengemukakan pendapatnya bahwa ada tiga dimensi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yaitu :

- 1). Partisipasi dalam tahap perencanaan
- 2). Partisipasi dalam pelaksanaan
- 3). Partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan

Dari urai diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata dalam setiap jenis kegiatan apabila pada diri masyarakat ada kemauan, kesediaan, kemampuan, upaya dan kesempatan atau peluang

### 3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang didukung oleh kuantitatif dengan menggunakan metode survei dalam pengumpulan data dan informasi yang diarahkan pada individu untuk memperoleh gambaran (deskripsi) nyata tentang bagaimana partisipasi masyarakat serta peranan lembaga lokal desa terhadap proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan PLTMH di Paneki.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat kampung Paneki Desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. Untuk menggali data yang lebih dalam maka penelitian juga melibatkan informen yang berasal dari berbagai karakter dan latar belakang baik jabatan, kapasitas maupun tingkat kepentingan yang merupakan elemen masyarakat baik dari unsur pemerintah maupun dari tokoh masyarakat.

Sampel dalam penelitian ini dilakukan secara non probabilitas sampling. Sedangkan teknik penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus dimana semua anggota populasi yaitu masyarakat kampung Paneki (Dusun 2 RT 4) yang merupakan pengguna jasa listrik dari semuanya dijadikan sampel. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel, Sugiyono (2007:85).

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari keterangan langsung responden baik yang diperoleh melalui kuesioner maupun yang disampaikan melalui teknik wawancara.

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari kantor desa Pombewe, instansi terkait, literatur dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.

Untuk mendapatkan data dan informasi digunakan teknik :

- a. Teknik kuesioner dilakukan dengan membagikan daftar pertanyaan yang telah didesain secara sistematis yang diberikan langsung kepada responden untuk dijawab secara tertutup.
- b. Teknik Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada informen yang berlangsung satu arah untuk mendapatkan

informasi secara lengkap, mendalam dan komprehensif sesuai tujuan penelitian.

- c. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk mengungkapkan fenomena yang tidak diperoleh melalui wawancara.
- d. Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan maksud menghimpun dan merekam data yang bersifat dokumentatif seperti pengambilan foto.

Instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti daftar kuesioner atau pertanyaan yang disusun berdasarkan kepentingan penelitian, kamera dan alat tulis menulis untuk mencatat data atau informasi yang didapat lapangan.

Teknik analisa data merupakan serangkaian proses dalam mengelompokkan data berdasarkan variabel jenis informen, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh informen, menyajikan perhitungan untuk menjawab rumusan dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan, Sugiyono (2005 :169).

Teknik analisa secara kuantitatif dilakukan melalui analisis distribusi frekwensi dari hasil pengolahan data daftar kuesioner. Dalam menganalisis data hasil kuesioner untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dan lembaga lokal terhadap kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan PLTMH di Paneki digunakan alat bantu berupa tabel frekwensi dan persentase dengan rumus:

$$P = F/N \times 100 \%,$$

dimana :

P = Prosentase

F = Frekwensi

N = Jumlah responden

Secara kualitatif dilakukan dengan penyelidikan dari hasil wawancara tak berstruktur baik terhadap aparat pemerintah maupun tokoh masyarakat. Menurut Moleong (1988:16) menyatakan bahwa pada dasarnya, baik teknik kuantitatif maupun teknik kualitatif dapat digunakan bersama-sama tetapi penekanannya diletakkan pada teknik tertentu.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan tiga tahap yaitu :

- a. Reduksi data yaitu proses pemilihan, perumusan pemusatan perhatian pada penyederhanaan transfortasi data kasar baik yang diperoleh melalui kuesioner maupun yang diperoleh dari catatan-catatan lapangan.
- b. Penyajian data adalah kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif yang dibantu dengan tabel dan bagan untuk mempertajam pemahaman peneliti terhadap informasi yang diperoleh.
- c. Penarikan kesimpulan adalah mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin yang dilakukan secara cermat yang dipadukan d data yang dfiperoleh dari kuesioner.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1 Gambaran lokasi penelitian

Paneki adalah nama sungai yang mengalir dari gunung kemudian melewati beberapa perkampungan di desa Pombewe. Kampung pertama yang dilewati sungai tersebut adalah RT 4 Dusun 2 desa Pombewe sehingga kampung tersebut lebih lazim disebut kampung Paneki. Nama asli dari kampung Paneki adalah *Boya Tanah Mate*. *Boya* artinya sebuah kampung yang didiami oleh sekelompok masyarakat sedangkan *Tanah Mate* artinya tanah yang tidak pernah diolah karena tingkat kesuburan yang rendah. Perubahan nama dari *Boya Mate* menjadi kampung Paneki terjadi secara alami seiring dengan adanya pembangunan gedung pramuka di lokasi tersebut sehingga kampung ini lebih sering disebut Paneki namun penyebutan nama *Boya Mate* masih sering digunakan orang. Posisi kampung Paneki berada pada bagian sebelah timur Desa Pombewe dengan pemukiman penduduk yang terpisah dari kampung lain. Kampung Paneki didiami oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari suku Ledo, dari kampung Raranggo Nau, sebuah kampung yang berlokasi di pegunungan sebelah timur kampung Paneki dengan jarak kurang lebih 6 km dari kampung Paneki.

Mata pencaharian masyarakat kampung Paneki adalah mencari kayu bakar dan rotan di gunung untuk dijual dan pada umumnya mereka tidak punya sawa atau kebun.

Budaya masyarakat yang ada di kampung Paneki sama dengan budaya masyarakat Desa

Pombewe dimana adat istiadat yang diwarisi nenek moyang mereka secara turun temurun masih dipegang teguh.

##### 4.2 Partisipasi Masyarakat

Proses pembangunan PLTMH di Paneki dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan pembangunan.

##### a. Analisis Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan Pembangunan PLTMH di Paneki

Kegiatan tahap perencanaan PLTMH merupakan suatu proses kegiatan yang mempersiapkan segala sesuatu secara sistematis yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Indikator yang digunakan untuk mengukur bentuk partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan pembangunan PLTMH di Paneki dapat dilihat dari beberapa proses kegiatan yang meliputi: (1) keikutsertaan masyarakat dalam proses sosialisasi dalam penyebarluasan informasi, pemberian pemahaman dan pembinaan dari aparat pemerintah; (2) keaktifan masyarakat dalam penyampaian aspirasi, masukan, usul, pendapat, idea atau gagasan; (3) keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan survei penentuan lokasi dan proses pembebasan lahan untuk lokasi pembangunan PLTMH; (4) kehadiran dalam diskusi menyangkut program kerja, penentuan aturan/norma, pembentukan lembaga pengelola dan kegiatan lain yang berhubungan dengan perencanaan PLTMH.

Untuk mendapatkan data tentang tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan pembangunan PLTMH di Paneki maka komponen kegiatan tersebut dijabarkan kedalam beberapa butir pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang dibagikan untuk dijawab responden serta fakta yang didapat dari informan melalui wawancara langsung.

Data hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan pembangunan PLTMH di Paneki yang diperoleh melalui kuesioner dan dianalisa dengan teknik analisis distribusi frekwensi dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Perencanaan PLTMH di Paneki Desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi.

No	Komponen Kegiatan	Tingkat Partisipasi							
		Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Kehadiran dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam menerima informasi, pembinaan atau pemahaman dari aparat pemerintah baik melalui rapat maupun disampaikan secara pribadi sehubungan dengan perencanaan pembangunan PLTMH	15	34	17	38,6	7	16	5	11,4
2.	Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan survei penentuan lokasi dan ikut pertemuan yang membicarakan proses pembebasan lahan lokasi pembangunan PLTMH.	19	43,2	11	25	9	20,5	5	11,4
3.	Kehadiran dan keaktifan masyarakat memberikan masukan, usul atau gagasan baik dalam diskusi maupun secara pribadi menyangkut program kerja pelaksanaan kegiatan pembangunan PLTMH.	18	40	15	34	6	13,6	5	11,4
4.	Kehadiran dan keaktifan masyarakat dalam memberikan masukan, usul atau gagasan dalam pembentukan norma atau aturan dalam pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan PLTMH.	21	47,7	14	31,8	7	16	2	4,5
5.	Kehadiran dan keaktifan masyarakat memberikan masukan, usul atau gagasan menyangkut penentuan lokasi serta mekanisme proses pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan PLTMH.	20	45,5	12	27,2	9	20,5	3	6,8
6.	Kehadiran dan keaktifan masyarakat dalam memberikan masukan, usul atau gagasan agar lembaga-lembaga lokal (BPD, LPM, KUD, dll) yang ada di desa dapat berperan atau berfungsi secara aktif untuk memberikan pembinaan dan motivasi kepada masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan PLTMH.								
Rata-rata		18,6	42,3	14,2	32,2	7,2	16,4	4	9,1

Sumber : Data primer diolah, 2011

Keterangan : F = Frekwensi, % = Persentase

Data hasil penelitian tentang tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan PLTMH di Paneki berdasarkan jawaban responden pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan pembangunan PLTMH di Paneki secara mayoritas dalam kategori sangat rendah atau secara persentase rata-rata 42,3 % responden. Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan bahwa rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan pembangunan PLTMH di Paneki disebabkan oleh beberapa faktor antara lain proses sosialisasi dalam rangka penyebaran informasi, pemberian pemahaman dan pembinaan baik dari aparat Desa Pombewe maupun aparat Dinas Pertambangan dan Energi kurang efektif karena sosialisasi tidak pernah dilakukan dalam bentuk pertemuan atau rapat dengan masyarakat dan proses penyampaian informasi hanya dilakukan dalam bentuk pemberitahuan secara langsung atau pribadi kepada setiap anggota masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki ruang atau kesempatan untuk menyalurkan aspirasi mereka baik berupa masukan, usul, pendapat maupun gagasan. Selain faktor tersebut diatas tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat Paneki terhadap informasi sangat lemah karena mayoritas hanya berpendidikan rata-rata SD bahkan ada yang tidak tamat SD akibatnya tingkat pemahaman dan wawasan mereka untuk menerima masukan masih kurang sehingga apabila ada program yang diarahkan ke desa mereka masih perlu pembinaan dan pemahaman.

b. Analisis Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan PLTMH di Paneki.

Pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan tujuan perencanaan sehingga

pada tahap pelaksanaan mempunyai arti yang sangat strategis dalam menentukan gagal tidaknya suatu program atau proyek. Pada tahap pelaksanaan pembangunan terdapat beberapa jenis kegiatan yang memungkinkan masyarakat dapat ikut terlibat dan ambil bagian terutama menyangkut pelaksanaan pekerjaan karena pada bagian ini masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut terlibat memberikan dukungan, motivasi atau semangat, mengorbankan tenaga, waktu dan material. Untuk mengkaji berapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan maka perlu mengidentifikasi jenis kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan sebagai indikator pengukuran tingkat partisipasi terdiri dari: (1) upaya yaitu dorongan atau semangat yang terkandung dalam diri masyarakat untuk mendukung program atau memiliki sifat ajakan kepada masyarakat lain, tumbuh rasa memiliki; (2) kemauan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam setiap jenis kegiatan baik dalam proses sosialisasi maupun proses pelaksanaan kegiatan; (3) kesediaan dan kemampuan masyarakat untuk berkontribusi sumberdaya baik tenaga, waktu, material, uang serta kehadiran dan keaktifan masyarakat untuk menerima informasi. Untuk menggali data tentang seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan PLTMH di Paneki maka aspek tersebut dijabarkan kedalam beberapa butir pertanyaan dalam bentuk kuesioner untuk dijawab oleh responden dalam penelitian ini.

Data hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan pembangunan PLTMH di Paneki yang diperoleh melalui kuesioner dengan teknik analisis distribusi frekwensi dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan PLTMH di Paneki. Desa Pombewe Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi.

No	Komponen Kegiatan	Tingkat Partisipasi							
		Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1.	Kehadiran dan keterlibatan masyarakat secara aktif menerima dan memberikan usul, gagasan dan pendapat tentang penyusunan teknis dan tata cara pelaksanaan kegiatan pembangunan PLTH	22	50	18	40,9	4	9,1	0	0

Tabel 2 (lanjutan)

No	Komponen Kegiatan	Tingkat Partisipasi							
		Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi	
		F	%	F	%	F	%	F	%
2.	Kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam pembersihan lokasi pembangunan rumah pembangkit, lokasi saluran pembawa, lokasi bak penenang dan jalur yang akan dilewati jaringan listrik untuk pembangunan PLTMH.	16	36,4	11	25	7	15,9	10	22,7
3.	Kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam penggalian lokasi saluran pembawa dan lokasi bak penenang PLTMH.	14	31,8	10	22,7	7	15,9	13	29,5
4.	Kehadiran dan keterlibatan masyarakat untuk mengangkut bahan atau material dari tempat yang tidak dapat dilewati kendaraan (mobil trek) ke lokasi pembangunan PLTMH.	16	36,4	14	31,8	4	9,1	10	22,7
5.	Kehadiran dan keterlibatan masyarakat untuk mengumpulkan material berupa pasir, kerikil, batu, penyediaan papan, balok dan material lain untuk bahan pengecoran bendungan dan bak penenang pada pembangunan PLTMH.	13	29,6	16	36,4	9	20,5	6	13,5
6.	Kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengecoran bendungan pengarah air, untuk pembangunan PLTMH.	17	38,6	14	31,8	4	9,1	9	20,5
7.	Kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengecoran saluran pembawa dan pengecoran bak penenang untuk pembangunan PLTMH.	16	36,4	17	38,6	9	20,5	2	4,5
8.	Kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemasangan pipa pesat untuk pembangunan PLTMH.	25	56,8	12	27,3	6	13,6	1	2,3
9.	Kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan penggalian tanah untuk tapak turbin dan pondasi rumah pembangkit PLTMH.	20	45,4	18	41	3	6,8	3	6,8
10.	Kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan rumah pembangkit atau turbin PLTMH.	21	47,7	15	34,1	4	9,1	4	9,1
11.	Kehadiran dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penarikan kabel dan pemasangan tiang jaringan listrik dari rumah pembangkit ke rumah penduduk.	21	47,7	15	34,1	5	11,4	3	6,8
12.	Kehadiran dan keterlibatan masyarakat untuk membantu pelaksanaan pemasangan instalasi listrik pada rumah-rumah penduduk.	29	65,9	9	20,5	4	9,1	2	4,5
13.	Kemauan masyarakat untuk menyumbangkan bahan atau material berupa kayu, papan atau material lain untuk digunakan dalam pelaksanaan pembangunan PLTMH.	22	50	12	27,2	5	11,4	5	11,4
<b>Rata-rata</b>		<b>19,4</b>	<b>44,1</b>	<b>13,9</b>	<b>31,6</b>	<b>5,5</b>	<b>12,4</b>	<b>5,2</b>	<b>11,9</b>

Sumber : Data primer diolah, 2011

Keterangan : F = Frekwensi, % = Persentase

Hasil penelitian sebagaimana yang disajikan dalam distribusi frekwensi pada tabel 2 diatas diperoleh data bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada masing-masing komponen kegiatan yang berhubungan dengan tahap

pelaksanaan pembangunan PLTMH di Paneki secara mayoritas dalam kategori sangat rendah atau secara persentase rata-rata 44,1 % responden. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan pembangunan

sangat erat kaitannya dengan proses kegiatan pada tahap perencanaan masih ada kaitannya dengan tahap perencanaan yaitu sosialisasi dari aparat pemerintah tidak berjalan dengan baik, tingkat wawasan dan pemahaman masyarakat yang masih rendah dan tidak ada koordinasi di tingkat aparat desa untuk memberi dukungan terutama dalam melakukan pembinaan dan pemahaman kepada masyarakat. Akibat dari proses sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik maka dikalangan masyarakat timbul pendapat yang berbeda-beda bahkan ada yang berpendapat bahwa pembangunan PLTMH tidak perlu di bantu karena merupakan proyek pemerintah.

Selain faktor tersebut diatas rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan pembangunan PLTMH di Paneki akibat kondisi ekonomi masyarakat di kampung Paneki pada umumnya tergolong kelompok masyarakat kurang mampu sehingga masyarakat lebih mengutamakan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mata pencaharian masyarakat di Paneki hanya rata-rata mencari kayu bakar, rotan atau pengumpul batu untuk dijual sebagai sumber penghasilan untuk menopang kebutuhan keluarga karena tidak ada peluang atau pekerjaan lain yang dapat dijadikan mata pekerjaan pokok sebagai sumber penghasilan. Itu sebabnya masyarakat Paneki tidak pernah menyia-nyiakan waktu mereka berprinsip bahwa waktu sangat berharga sebab apabila ada waktu yang terbuang penghasilan mereka akan berkurang bahkan tidak punya penghasilan.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pembangunan PLTMH di Paneki dapat disimpulkan bahwa :

- Partisipasi masyarakat kampung Paneki terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan PLTMH di Paneki secara persentase mayoritas sangat rendah karena proses sosialisasi dari aparat pemerintah tidak berjalan dengan baik, tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap informasi masih rendah, dan masyarakat di kampung Paneki lebih mengutamakan melakukan aktifitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena kondisi ekonomi masyarakat Paneki pada umumnya kategori kurang mampu.

## 6. Daftar Pustaka

- Kadir, A. 1995. *Energi: Sumberdaya, Inovasi, Tenaga Listrik, Potensi Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Jucha, Nasruddin. 1983. *Studi Evaluasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Di Desa Cisalada Kabupaten Bogor*. Bandung: ITB.
- Kadir, A. 1982. *Energi: Sumberdaya, Inovasi, Tenaga Listrik, Potensi Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Makmun dan Sri Lestari Rahayu. 1995. *Permasalahan Bidang Ketenagalistrikan Di Indonesia Sekarang Dan Masa Depan*. Jakarta: Fokus Media.
- Ohama, Yutaka. 2002. *Participatory approach*. Jica International Training on Plsd : Nagoya.
- Prih, Sumardjati. 2008. *Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Purnomo, Bambang. 1994. *Tenaga Listrik Profil Dan Anatomi Hasil Pembangunan Dua Puluh Lima Tahun*. Jakarta: Gramedia Pusaka Utama.
- Tutu, Abdullah. 1986. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta : Rosdakarya.